

# newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 145, Agustus 2021



Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI Dalam Memasuki Era Industri 4.0.....	2
Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber dalam Webinar IPRI .....	3
Lemhannas RI menyalurkan Hewan Qurban ke Tiga Tempat.....	4
Pengantar Pimpinan Kepada Peserta Taplai Virtual Angkatan II.....	5
Peserta PPRA 62 Menerima Ceramah dari Ketua KPK RI .....	6
Dirut BPJS Kesehatan Memberikan Ceramah Kepada Peserta PPSA 23 .....	7
Olah Sismennas Ke-50 PPRA 62 Lemhannas RI.....	8
Diskusi Panel PPSA 23.....	9
Sosialisasi Penyusunan Penilaian Kinerja Bagi Pejabat Fungsional di Lemhannas RI.	9
Pembekalan Gubernur Lemhannas RI Untuk Peserta PPRA 62 .....	10

## Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI Dalam Memasuki Era Industri 4.0

# Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam Memasuki Era Industri 4.0

Selasa, 13 Juli 2021

**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara daring membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam Memasuki Era Industri 4.0 pada Selasa (13/07).

Dalam sambutannya, Agus mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kapasitas personel sebagai pendorong transformasi yang mendukung Indonesia melakukan lompatan proses pencapaian aspirasi Roadmap atau Peta Jalan Program Making Indonesia 4.0 dan pembangunan berkelanjutan melalui tindakan kolaboratif dan solusi yang inovatif.

Selain itu, Agus juga mengatakan bahwa Penguatan Kapasitas Personel Lemhannas RI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan pool of mentor sehingga dapat meningkatkan kinerja para personil Lemhannas RI. Pada kegiatan ini para peserta akan dibekali program penguatan kapasitas personel menggunakan pendekatan Theory U dan System Thinking agar para peserta memahami struktur permasalahan sistematis, perbedaan

konsep berpikir linear dan sistem sehingga diharapkan peserta mampu memahami cara mengkomunikasikan tantangan sistematis secara efektif dengan menggunakan bahasa system thinking.

“Pelatihan ini ditujukan kepada individu perorangan yang pada hakikatnya, merupakan latihan pengembangan diri,” tutur Agus, Lebih lanjut Agus menyampaikan kepada para peserta, agar setelah mengikuti kegiatan tersebut dapat mengubah kerangka berpikir dari Ego System menjadi Eco System agar sebuah organisasi bisa maju kedepannya di Era Industri 4.0.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Widjojo juga menyampaikan harapannya agar peserta dapat memahami dan mempraktikkan seni mendengarkan, proses internal dan eksternal yang terjadi dalam sebuah komunikasi, serta mampu membangun lingkungan yang sehat untuk tercapainya komunikasi dalam meningkatkan kinerja tim.

Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI yang

menjadi Ketua Tim Pelaksana Making Indonesia 4.0 tahun 2021, Mayjen TNI Sugeng Santoso, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 60 peserta. Rincian peserta terdiri dari 10 orang eselon I, tiga orang eselon II, empat orang eselon IV dan staf sebanyak 43 orang. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring sejak 13 hingga 23 Juli 2021.



**Penguatan kapasitas personel Lemhannas RI merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan pool of mentor sehingga dapat meningkatkan kinerja para personil Lemhannas RI.”**

Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo  
Gubernur Lemhannas RI





## Gubernur Lemhannas RI menjadi Narasumber dalam Webinar IPRI

**Kamis, 15 Juli 2021**

**G**ubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi saat menjadi salah satu narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh Islamabad Policy Research Institute (IPRI), pada Kamis (15/7).

Webinar yang mengangkat tema *The Role of Armed Forces in National Development and Its Impact on Civil-Military Relations* menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai negara. Turut hadir, Direktur Riset IPRI Brigjen (Purn) Raashid Wali Janjua, Profesor Asosiasi Institut Pemikiran Strategis Turki, Mayjen (Purn) Prof. Dr. Guray Alpar, Akademisi Pusat Universitas Eropa Austria Kirill Shamiev, Mantan Penasihat Keamanan Nasional Pakistan Letjen (Purn) Nasser Khan Janjua, HI(M), dan Professor Berjasa dari Universitas Karachi

Pakistan Dr. Moonis Ahmar.

Dalam paparannya, Agus menjelaskan bahwa peran angkatan bersenjata di negara mana pun sebenarnya tunduk pada kehendak rakyat. Hal tersebut tergantung pada masyarakat di negara tersebut bagaimana mereka akan menyetujui pengaturan militer sebagai bagian dari pemerintah. Namun, menurutnya ada perbedaan sistem politik yang dianut sebuah negara yang akhirnya juga akan menghasilkan bentuk hubungan yang berbeda juga. "Itu sebenarnya sebuah alur pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan dalam konteks sistem politik yang demokratis," ucap Agus

Kemudian Agus juga menjelaskan mengenai hubungan antara sipil dan militer. Menurutnya hubungan antara

sipil militer dimulai dari perumusan kebijakan oleh otoritas pemerintah sipil. Pemerintah sipil memiliki otoritas tersebut karena mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi kebijakan di tingkat operasional oleh militer. Selanjutnya implementasi kebijakan tersebut diikuti dengan pengawasan dan pengendalian kebijakan oleh otoritas sipil.

Menyinggung peran angkatan bersenjata dalam pembangunan nasional, Agus menilai bahwa sebenarnya tanggung jawab pembangunan nasional ada pada pemerintah melalui lembaga fungsional, tetapi angkatan bersenjata dapat diperbantukan dalam peran bantuan militer kepada pemerintah sipil di masa damai sebagai misi tambahan. Perbantuan tersebut tentunya dengan keputusan presiden, karena angkatan bersenjata sebagai pertahanan negara merupakan tanggung jawab pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. "Angkatan bersenjata akan dikembalikan pada peran organik pertahanan setelah tugas perbantuan selesai," pungkas Agus.

# Lemhannas RI Menyalurkan Hewan Kurban ke Tiga Tempat

Selasa, 20 Juli 2021



**B**erbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, pada peringatan Hari Raya Iduladha 1442 H/2021 M, Lemhannas RI hanya menyalurkan hewan kurban ke beberapa Masjid dan Musholla secara simbolis pada Selasa (20/7). Hal tersebut dilakukan guna mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sebanyak enam ekor sapi dan dua ekor kambing diserahkan ke tiga tempat berbeda, yakni ke Masjid Assuhaimiah di Jalan Kebon Sirih Barat, Musholla Ar Rahmaniah di Jalan Kebon Sirih Barat, dan Masjid Al Maghfiroh, Bekasi. Potongan hewan kurban dilakukan oleh masing-masing panitia di tiga lokasi tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan

dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dilansir dari wapresri.go.id, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin pada Takbir Akbar Hari Raya Iduladha 1442 H yang diselenggarakan secara virtual, mengajak seluruh elemen masyarakat pada masa pademi Covid-19 ini lebih memaknai Iduladha sebagai momentum berbagi kebaikan terutama bagi mereka yang membutuhkan. "Esensi dari semangat kurban sebenarnya bukan hanya sekedar berkurban kambing atau sapi, akan tetapi semangat untuk membantu sesama terutama bagi mereka yang membutuhkan," ujar Wapres.

Wapres berharap Iduladha kali ini menjadi momentum untuk menghidupkan semangat berkurban demi kebaikan dan keselamatan bersama yang sudah dimiliki oleh Lemhannas RI dan sekaligus memperluas pemanfaatannya. "Tidak hanya bagi Lemhannas RI, tetapi juga dapat dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bahkan diharapkan sampai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara," tegas Suroto.





Senin, 26 Juli 2021

## Pengantar Pimpinan kepada Peserta Taplai Virtual Angkatan II

**G**ubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pengantar pimpinan kepada peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) Secara Virtual Angkatan II, pada Senin (26/7) secara daring.

Saat memberikan pengantar pimpinan, Agus mengatakan bahwa ketika para pendiri bangsa menemukan sebuah wadah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka para pendiri bangsa itu tidak hanya tinggal diam. "Untuk memanfaatkan wadah tersebut sebaik-baiknya. Wadah tersebut harus diisi dengan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita para founding fathers. Dan kita bukan tanpa tujuan ikut arus, tetapi kita isi dengan tujuan tentang cita-cita bangsa," jelas Agus.

Lanjut Agus, yang menjadi

elemen kunci adalah bahwa kita tahu bangsa Indonesia bercirikan ke-bhinneka-an. menurutnya, itu adalah given oleh Yang Maha Kuasa. Dengan Ke-bhinneka-an tersebut, Indonesia mendasarkan pengambilan kesepakatan dengan musyawarah.

Salah satu contoh yang diungkap Agus adalah peristiwa Sumpah Pemuda dimana disepakatinya bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang berasal dari rumpun bahasa melayu, bukan bahasa Jawa karena suku Jawa merupakan jumlah terbesar dari suku etnis di Indonesia. Pada peristiwa tersebut disepakati bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. "Itu adalah kesepakatan, tidak dilihat dari besar kecilnya, tidak dilihat dari mayoritas minoritas, tapi kita ambil pelajarannya disitu. Bangsa

Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bukan hubungan mayoritas minoritas," kata Agus.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa yang diharapkan dari para alumni Lemhannas RI bukanlah kemampuan menghafal. Namun, yang diharapkan adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap Konsensus Dasar Kebangsaan secara konsisten. Komitmen tersebut bisa diawali dengan kompetensi untuk memahami Konsensus Dasar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Kata kuncinya adalah kompetensi, setelah kompetensi diikuti oleh komitmen dalam bentuk perilaku," ujar Agus.



Kamis, 29 Juli 2021

## Peserta PPRA 62 Menerima Ceramah dari Ketua KPK

**P**eserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lemhannas RI menerima ceramah dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firlu Bahuri, M. Si. pada Kamis (29/7), secara daring.

Firlu yang juga merupakan Alumni Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 21 Tahun 2017 Lemhannas RI, mengawali paparannya dengan menyampaikan tentang tanggung jawab yang melekat pada setiap anak bangsa.

**Siapun dia, jabatan apapun yang dia miliki, status apapun dia, maka tidak boleh lepas dari konsep berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan dan dibangun oleh para pendiri Bangsa."**

**Komjen Pol. Firlu Bahuri, M.Si.**  
Ketua KPK RI

Lebih lanjut, Firlu menyampaikan bahwa dalam mengemban tanggung jawab sebagai anak bangsa, setidaknya kita harus memahami tujuan negara yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Tujuan negara tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam ceramah tersebut, peserta PPRA 62 menerima penjelasan mengenai peran KPK dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi. Firlu menjelaskan bahwa area yang menjadi fokus KPK adalah korupsi terkait sumber daya alam, korupsi dalam bisnis, korupsi dalam politik, korupsi pada penegakan hukum, dan korupsi pada pelayanan publik. "KPK membuat visi bersama masyarakat menurunkan

tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju," ujar Firlu.

Berdasarkan visi tersebut, KPK menjalankan empat misi, yakni mencegah terjadinya korupsi dengan perbaikan sistem, mencegah terjadinya korupsi dengan cara pendidikan, melakukan pemberantasan korupsi dengan cara penindakan, serta menjaga akuntabilitas dan profesionalisme kelembagaan.

Saat ini KPK juga tengah menjalankan tiga strategi dalam pemberantasan korupsi. Pertama, melalui pendekatan pendidikan masyarakat. Kedua adalah dengan pendekatan pencegahan melalui perbaikan sistem. Ketiga, yaitu melalui penindakan tegas dalam rangka penegakan hukum supaya setiap orang takut melakukan korupsi. Dengan menerapkan ketiga strategi tersebut diharapkan pada suatu saat nanti, Indonesia yang bebas dari korupsi dapat terwujud.

# Dirut BPJS Kesehatan Memberikan Ceramah kepada Peserta PPSA 23

Jumat, 30 Juli 2021



Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan.

“Dibutuhkan kreativitas dan inovasi, kami sedang mengembangkan inovasi tambahan yaitu inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN,” ujar Ali Ghufron. Pendanaan Masyarakat Peduli JKN yang dimaksud adalah sebuah Gerakan Donasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik secara kolektif maupun perorangan dalam membantu membayar peserta JKN yang memiliki tunggakan.

Jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan adalah sebanyak 22.759 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.546 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Tingkat kepuasan terhadap BPJS kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik karena 8 dari 10 Peserta JKN menyatakan puas terhadap layanan BPJS Kesehatan.

Dalam Laporan Pengelolaan Jaminan Sosial Kesehatan dari 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan kunjungan peserta JKN meningkat setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat peserta JKN yang tidak betul-betul sakit memilih untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan.

**D**irektur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, secara daring, memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 pada Jumat (30/7).

Ali Ghufron menyampaikan bahwa dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan pada tahun 2024 harus mencapai 98% dari total penduduk. Ali Ghufron mengakui bahwa hal tersebut bukan target yang mudah bagi BPJS Kesehatan. Beberapa faktor penyebabnya adalah karena penduduk Indonesia yang berjumlah besar dan struktur ekonominya banyak didominasi oleh sektor informal.

Lebih lanjut Ali Ghufron juga menyinggung beberapa masalah yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam proses peningkatan cakupan kepesertaan. “Yang menjadi masalah adalah The Missing Middle, dia miskin tidak tapi kaya juga tidak,” jelas Ali Ghufron.

Menurut data yang dimiliki BPJS Kesehatan, The Missing Middle yang dimaksud berjumlah kurang lebih 30 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori The Missing Middle akan membutuhkan banyak waktu dalam proses pemenuhan target cakupan kepesertaan. Hal tersebut terjadi karena kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) diurus melalui koordinasi Kementerian

”  
**Yang menjadi masalah adalah The Missing Middle, dia miskin tidak tapi kaya juga tidak.”**

**Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK**  
Direktur Utama BPJS Kesehatan

# Olah Sismennas ke-50 PPRA 62 Lemhannas RI

Senin, 3 Agustus 2021

Seluruh peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 Lemhannas RI melaksanakan Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas) ke-50 pada yang dibuka Senin (3/8) secara daring.

Tema yang diangkat pada Olah Sismennas kali ini adalah “Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintahan dan Instansi Terkait dalam Menghadapi Pemulihan Ekonomi Nasional di Tengah Penyelesaian Pandemi Covid-19”.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa Olah Sismennas merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Lemhannas RI dalam proses belajar

mengajar bagi para peserta Program Pendidikan Reguler maupun Program Pendidikan Singkat.

Sugeng menegaskan bahwa kegiatan Olah Sismennas merupakan simulasi hubungan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga untuk menghasilkan serta melaksanakan suatu kebijakan pemerintah.

Dalam kesempatan ini, Direktur Operasional Pendidikan Kedepuitan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Marsma TNI Maman Suherman, M.A.P. juga menjelaskan empat sasaran utama Olah Sismennas. Sasaran pertama adalah, peserta PPRA 62 memahami dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dari seluruh bidang studi yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Lemhannas RI. Kedua, peserta memahami dan mampu membuat kebijakan strategis dan rekomendasi kebijakan dalam mewadahi para pemangku kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan nasional yang faktual secara komprehensif dengan terlebih dahulu merumuskan dan menginventarisasi pokok persoalan.

Ketiga, peserta memahami dan mampu melakukan koordinasi lintas sektoral, baik antarinstansi secara horizontal maupun vertikal, melalui proses mekanisme pengambilan

keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif pada tingkat nasional, regional, maupun global. Dan keempat, peserta mampu mengambil keputusan dalam kondisi kritis atau terbatas baik dari aspek maupun waktu sarana dan prasarana yang tersedia.

Melalui Olah Sismennas, diharapkan kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat terselenggara secara sinergis, efektif, dan efisien. Sehingga pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan skenario yang telah direncanakan serta membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.



**Kegiatan Olah Sismennas merupakan simulasi hubungan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan serta melaksanakan suatu kebijakan pemerintah.**

**Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P.**  
Deputi Bidang Pendidikan Lemhannas RI







Rabu, 4 Agustus 2021



## Diskusi Panel PPSA 23

**K**etua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) memberikan ceramah kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23, pada Rabu (4/8) secara daring.

Seto Mulyadi yang dalam paparannya mengangkat tema "Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Saat Pandemi", menyampaikan bahwa

ada kondisi negatif yang harus dihadapi anak-anak semasa pembelajaran daring ketika pandemi Covid-19.

Seto mengungkapkan bahwa seringkali anak-anak sampai tertidur karena kelelahan belajar dari pagi hingga siang hari. Anak-anak terpaksa untuk menatap layar berjam-jam sehingga membuat mata terganggu hingga akhirnya memakai kacamata. "Berbagai materi calistung, matematika, dan sebagainya terasa begitu abstrak akhirnya anak-anak sering pusing tujuh keliling," jelasnya. Menurut Seto hal tersebut juga membuat orang tua menjadi stres hingga anak-anak menjadi jenuh sehingga hasil belajar menjadi tidak optimal.

Lebih lanjut, Seto mengatakan masalah lain pada saat pembelajaran daring terhadap anak adalah tidak memiliki handphone, susah sinyal, terbatasnya kuota, mata lelah, pelajaran sulit, dan membosankan sehingga memicu konflik dalam keluarga yang akibatnya menciptakan berbagai kekerasan terhadap anak. Survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) akibat dari pembelajaran daring saat ini sebanyak 13% anak mengalami depresi,

bahkan beberapa diantaranya dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi yang diakibatkan.

Sementara, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat sebelum dan saat pandemi Covid-19 adalah mewujudkan SDM berkualitas dalam rangka memasuki era bonus demografi.

Era bonus demografi merupakan suatu keadaan penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Beberapa negara maju umumnya menjadi sejahtera dan menjadi kaya pada saat melewati celah bonus demografi.

Memiliki bonus demografi bukan berarti tanpa kendala, menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 27,6% remaja di Indonesia mengalami stunting yang artinya daya pikir dan fisik tidak optimal kemudian hari tuanya mudah kena penyakit sehingga tidak produktif dan sebelum pandemi terjadi 9,8% diantaranya mengalami gangguan mental.

# Sosialisasi Penyusunan Penilaian Kinerja bagi Pejabat Fungsional di Lemhannas RI

Rabu, 4 Agustus 2021



Lemhannas RI mengadakan Sosialisasi Penyusunan Penilaian Kinerja bagi Pejabat Fungsional di Lemhannas RI, pada Rabu (4/8) secara daring. Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber selaku Koordinator Manajemen Kinerja SDM Aparatur, Kementerian PANRB, Agus Yudi Wicaksono, M.PP.

Kepala Biro Umum Lemhannas RI Brigjen Pol. Drs. Sukadji, M.M. yang membuka sosialisasi tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa penilaian kinerja PNS dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen

Kinerja Pegawai Negeri Sipil. "Penilaian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem manajemen kinerja yang terdiri atas perencanaan kinerja; pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja PNS," jelas Sukadji.

Kinerja yang dimaksud merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/atau unit kerja sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Penilaian kinerja dilaksanakan oleh seluruh PNS, terlebih sebagai pejabat fungsional, yaitu jabatan yang fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sementara Agus Yudi selaku narasumber, menjelaskan mengenai Sistem Manajemen Kinerja yang terdiri dari empat tahapan, yakni Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja, Penilaian Kinerja, serta Tindak Lanjut. "SKP (Sasaran

Kerja Pegawai) dalam struktur arsitektur sistem manajemen kinerja adalah bagian pertama dari empat bagian, hanya 25% sebenarnya, tetapi secara pelaksanaannya perencanaan kinerja ini bobotnya paling tinggi," kata Yudi.

SKP yang masuk dalam tahap Perencanaan Kinerja memiliki bobot paling tinggi karena pada tahapan tersebut dilakukan perencanaan kinerja yang terkait dengan kontribusi terhadap kinerja unit kerja atau atasan.



**Keberhasilan dari kinerja unit kerja yang didukung oleh kinerja individu itu sangat tergantung dari leadership. Untuk itu sangat diharapkan para atasan harus bisa memimpin dialog kinerja, ada ekspektasi kinerja dan strategi pencapaian kinerja**

**Agus Yudi Wicaksono, M.PP.**

Koordinator Manajemen Kinerja SDM Aparatur  
Kementerian PANRB

Oleh karena itu, Yudi menegaskan bahwa pentingnya kepemimpinan dalam pengelolaan kinerja menuntut atasan harus mampu memimpin dialog kinerja bersama bawahan, menyampaikan ekspektasi kinerja dan strategi pencapaian kinerja, dan selama pelaksanaan kinerja diharapkan dapat memberikan ongoing feedback kepada pegawai yang dipimpinnya latihan kemiliteran hanya satu. "Jadi bisa kita katakan latihan kemiliteran hanya 20% tentang pembentukan kemampuan awal bela negara," kata Agus.

Jumat, 6 Agustus 2021

## Pembekalan Gubernur Lemhannas RI untuk Peserta PPRA 62

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo memberikan pembekalan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dengan tema “Anatomi Sistem Keamanan Nasional” pada Jumat (6/8) secara daring.

Dalam pembekalan tersebut, Agus ingin para peserta memahami tentang perkembangan sistem keamanan nasional di Indonesia. Agus melihat bahwa makna tentang keamanan terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu Keamanan Antarbangsa, Keamanan Nasional (dalam negeri), dan Keamanan Insani (human security) yang ditujukan dalam negeri yang bersifat lingkup insan.

Keamanan Antarbangsa terdiri dari keamanan regional dan keamanan bersama bersifat Internasional. Keamanan Antarbangsa adalah keamanan secara keseluruhan bagi bangsa. Di dalam Keamanan Nasional ada Keamanan Dalam Negeri dan juga berkaitan dengan keamanan serta ketertiban masyarakat yang sifatnya untuk menjaga keamanan dalam masyarakat terhadap gangguan-gangguan fisik kecil. Di samping itu juga berkembang Keamanan Insani (human security) agar bebas dari ancaman fisik maupun non-fisik.

Lebih lanjut Agus juga menjelaskan mengenai peran otoritas

militer dan peran otoritas sipil. Otoritas militer berperan menentukan strategi atau cara militer untuk mencapai tujuan politik, mematuhi undang-undang dan loyal kepada otoritas politik, serta melaksanakan manajemen internal untuk menjamin kesiapan operasional. Sedangkan peran otoritas sipil adalah merumuskan kebijakan, membuat keputusan pengarahannya militer, menentukan tujuan pengerahan, menentukan tingkat kekerasan, menentukan strategi nasional, serta melakukan kontrol demokratis dan oversight.

Mengenai hubungan sipil-militer, Agus menjelaskan bahwa yang menentukan hubungan tersebut adalah dua kontrol demokratis, yakni kontrol subjektif dan objektif. Kontrol subjektif adalah kontrol sipil dengan kepentingan sipil untuk mendapatkan dukungan politik militer. Sedangkan kontrol

objektif adalah kontrol sipil dengan memberi keleluasaan profesional kepada militer untuk melakukan manajemen internal dalam rangka mencapai kesiapan operasional disertai rambu-rambu kontrol demokratis.

Dalam prinsip-prinsip tataran kewenangan, Agus berpendapat bahwa fungsi keamanan nasional secara klasik diartikan mencakup fungsi diplomasi, pertahanan, dan penegakan hukum yang dapat diartikan sebagai fungsi keamanan dalam negeri. Sedangkan fungsi pertahanan merupakan fungsi pemerintahan yang selalu bersifat nasional, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tidak pernah diberikan kepada pemerintah daerah. digunakan jelas (penggunanya),” kata Rahmat Gunawan.



**Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI**

Penanggung Jawab: **Agus Arif Fadila** Redaktur: **Alton Endarwanto Hadi Susanto**  
Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto** Pembuat Artikel: **Naomi Augustina**  
Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**  
Sekretariat: **Irmina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**  
**Gatot, Yatik Wulandari, Yusradi**

Alamat Redaksi:

**Biro Humas Settama Lemhannas RI**, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>